

Universitas Ngudi Waluyo

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi Hukum Dan Humaniora
Skripsi, 25Maret 2025

Anasya Agillia Putri

184211009

Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
Di Kecamatan Banyubiru

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan pemahaman wajib pajak di Kecamatan Banyubiru terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran mereka.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan meliputi data sekunder dari dokumen Kecamatan Banyubiru, seperti struktur organisasi dan literatur pendukung, serta data primer dari wawancara dengan wajib pajak. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan laporan pembayaran PBB, arsip perpajakan, dan dokumen terkait lainnya.

Hasil: Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Banyubiru selama tahun 2020 hingga 2023 berada dalam kategori cukup patuh, dengan capaian antara 72,81% hingga 88,34%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan, dengan capaian hanya 51,67% sehingga masuk dalam kategori tidak patuh. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memaknai PBB sebagai bentuk tanggung jawab warga negara, kontribusi terhadap pembangunan, dan keperluan administratif. Faktor sosial-budaya seperti nilai gotong royong, pengaruh tokoh masyarakat, kebiasaan keluarga, dan tingkat pendidikan turut membentuk kesadaran pajak. Di sisi lain, kondisi ekonomi menjadi penghambat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana PBB juga memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Simpulan: Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Banyubiru tergolong cukup patuh pada tahun 2020–2023 dengan capaian 72,81%–88,34%, namun menurun menjadi 51,67% pada 2024 sehingga masuk kategori tidak patuh. Sebagian besar masyarakat memaknai PBB sebagai tanggung jawab warga, kontribusi pembangunan, dan keperluan administratif. Faktor sosial-budaya seperti gotong royong, peran tokoh, kebiasaan keluarga, dan pendidikan membentuk kesadaran pajak, sementara kondisi ekonomi dan kurangnya transparansi menjadi hambatan.

Kata kunci: Kesadaran, Kontribusi Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

Universitas Ngudi Waluyo
Tax Accounting Study Program, Faculty Of Law Economics And Humanities
Thesis/Scientific Paper, 25 March 2025
Anasya Agillia Putri
184211009

ABSTRACT

Background: The purpose of this study is to ascertain how Banyubiru Village taxpayers perceive and comprehend their duty to pay Land and Building Tax (PBB), as well as to examine the variables affecting their knowledge.

Methods: This study combines a qualitative descriptive method with a case study methodology. Both primary data from taxpayer interviews and secondary data from Banyubiru Village papers, such as organizational structures and supporting literature, were used. PBB payment reports, tax archives, and other relevant papers are gathered using documentation procedures.

Result: Between 2020 and 2023, Banyubiru Village's taxpayer compliance fell into the category of fairly compliant, with accomplishments ranging from 72.81% to 88.34%. However, there was a notable drop in 2024, as seen by the attainment of only 51.67%, which placed it in the non-compliant category. According to the interview's findings, the majority of people consider PBB as a way to fulfill administrative requirements, contribute to development, and fulfill civic duty. Tax awareness is also influenced by sociocultural elements like family customs, education levels, the influence of community leaders, and principles of mutual cooperation. However, the state of the economy is a barrier, particularly for those with modest incomes. Public trust is also impacted by the opaqueness of PBB money utilization.

Conclusion: With an achievement of 72.81%–88.34% in 2020–2023, Banyubiru Village's taxpayer compliance level was deemed quite compliant; however, in 2024, it fell to 51.67%, making it non-compliant. The majority of individuals view PBB as an administrative necessity, a civic duty, and a contribution to progress. Tax awareness is shaped by sociocultural elements like education, family customs, the role of figures, and mutual collaboration, while barriers include the state of the economy and a lack of transparency.

Keywords: Awareness, Land and Building Tax, Tax Contribution